

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Inspektorat Magetan, 2014 menyebutkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan itu ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit dan lamban. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah tersebut disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat serta bagaimana infrastruktur pemerintahan, dana, sarana, teknologi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut,

sehingga kinerja pelayanan publik menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.

Pemerintah melalui industri jasa konstruksi mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Berbagai jenis proyek seperti proyek pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, perkantoran dan perumahan adalah beberapa contoh wujud nyata hasil produk industri jasa konstruksi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang membahas tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan yang dilakukan oleh APIP terdiri dari *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan lainnya.

Masyarakat dan pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, transparan dan teratur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari kode etik dan standar audit. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sedangkan standar audit APIP dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor intern pemerintah.

Disamping jasa konstruksi, pada pihak pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan sumber daya yang berhubungan dengan jasa konstruksi diantaranya berupa: monitoring, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan konstruksi baik ketika proses konstruksi maupun pasca konstruksi. Peran auditor dalam pemeriksaan konstruksi diharapkan dapat mendeteksi kelemahan-kelemahan pelaksanaan jasa

konstruksi di pemerintah daerah, sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam mewujudkan *good governance*.

Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap pengawasan oleh auditor internal yang telah melakukan pemeriksaan konstruksi yang dilaksanakan baik ketika proses pelaksanaan konstruksi maupun pasca konstruksi di lingkungan pemerintah daerah, maka penulis mengambil judul pada penulisan tesis ini yaitu:”**Evaluasi Hasil Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi dan Pasca Konstruksi**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, maka diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik-karakteristik yang melekat pada auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan konstruksi?
2. Apakah yang menjadi unsur utama dalam pemeriksaan konstruksi?
3. Adakah hubungan antara karakteristik auditor dengan unsur-unsur dalam pemeriksaan konstruksi?

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ditetapkan, maka perlu adanya pembatasan terhadap masalah yang ditinjau. Batasan-batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Magetan.
2. Sumber data adalah data primer dengan menggunakan sistem kuesioner.
3. Pengolahan data dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, diharapkan mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik-karakteristik auditor di Inspektorat Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan pemeriksaan konstruksi.
2. Mengetahui prioritas unsur utama dalam pemeriksaan konstruksi.

3. Mengetahui hubungan karakteristik-karakteristik auditor dengan unsur-unsur yang diperhatikan dalam pemeriksaan konstruksi pada satuan kerja perangkat daerah.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberi sumbangan teoritis pada bidang audit yaitu mengenai evaluasi hasil pengawasan audit konstruksi.
  - b. Memperkaya kepustakaan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan komposisi jumlah tenaga teknis yang dibutuhkan dalam pemeriksaan konstruksi.
  - b. Dapat digunakan oleh lembaga terkait sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pengawasan.